

## EKONOMI BERKELANJUTAN: KUNCI KETAHANAN PANGAN DAN KEMAJUAN INDONESIA EMAS DI IKN

Dedy Effendi<sup>1</sup>, Wahyu Saputra<sup>2</sup>, Nur Yanti<sup>3</sup>

*Prodi Magister Manajemen*

*Universitas 17 Agustus Samarinda*

### ABSTRAK

Pada tahun 2045, Indonesia berambisi menjadi negara maju sejajar dengan adidaya. Dalam konteks ini, pentingnya ekonomi berkelanjutan sebagai fondasi untuk mencapai tujuan tersebut menjadi semakin jelas. Dengan fokus pada ketahanan pangan, artikel ini mengidentifikasi tantangan multidimensi yang dihadapi Indonesia. Dalam rangka memahami peran ekonomi berkelanjutan, artikel ini menyoroti prinsip kemandirian pangan dan kedaulatan pangan yang menjadi landasan kebijakan pangan nasional. Dengan demikian, artikel ini menyajikan landasan untuk pemahaman yang mendalam tentang upaya Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan sebagai bagian integral dari visi negara untuk mencapai kemajuan pada tahun 2045.

**Kata kunci:** ketahanan pangan, ekonomi berkelanjutan, Indonesia Emas, IKN, ekonomi hijau

### ABSTRACT

*By 2045, Indonesia's ambition is to become a developed country on par with superpowers. In this context, the importance of a sustainable economy as the foundation for achieving this goal becomes increasingly clear. With a focus on food security, this article identifies the multidimensional challenges facing Indonesia. In order to understand the role of a sustainable economy, the article highlights the principles of food self-reliance and food sovereignty that underpin national food policy. As such, it provides a foundation for a deeper understanding of Indonesia's efforts in realizing sustainable food security as an integral part of the country's vision for progress by 2045.*

**Keywords:** food security, sustainable economy, Indonesia Emas, IKN, green economy

### PENDAHULUAN

Pada tahun 2045, Indonesia berharap menjadi negara maju dan sejajar dengan negara adidaya. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah telah berkomitmen mewujudkan generasi Indonesia Emas melalui Seribu Hari Pertama Kehidupan sebagai fondasi penting dalam tumbuh kembang anak-anak di masa depan. Anak-anak Indonesia yang berjumlah 84,4 juta penduduk dibawah umur 18 tahun diharapkan dapat menjadi SDM unggul yang akan memimpin bangsa ini. Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, pemerintah telah mengembangkan strategi untuk meningkatkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja, dan pengembangan teknologi informasi. Ekonomi

berkelanjutan berarti mengembangkan sistem ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan masa depan tanpa mengorbankan generasi masa kini. Dalam konteks ini, peran ekonomi berkelanjutan sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional, terutama mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja, dan pengembangan teknologi informasi.

Seiring pesatnya pertumbuhan populasi dan semakin terasa dampak perubahan iklim, ekonomi hijau berkelanjutan menjadi kunci utama untuk mencapai ketahanan pangan yang tangguh. Pendekatan ini menghadirkan solusi inovatif untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan akses terhadap pangan bergizi bagi seluruh masyarakat.

Ekonomi hijau berkelanjutan menawarkan transformasi menuju sistem pangan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, meminimalkan emisi gas rumah kaca, dan menjaga keanekaragaman hayati. Ekonomi hijau berkelanjutan dapat membantu meningkatkan hasil panen, mengurangi limbah, dan meningkatkan pendapatan petani.

Setiap negara berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan dan gizi yang cukup untuk warga negaranya, karena dua hal itu merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Oleh sebab itu, setiap negara termasuk Indonesia juga berupaya untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi warganya dengan cara meningkatkan berbagai upaya untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi secara berkelanjutan. Upaya ini sejalan dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan; mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan; dan berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat (pasal 12, 46, dan 59). Upaya tersebut dicapai dengan prinsip kemandirian pangan dan kedaulatan pangan.

Ketahanan pangan adalah isu multidimensi dan sangat kompleks, yang mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Faktor yang paling dominan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan pangan adalah aspek politik. (Suryana, 2014).

Ketahanan Pangan merupakan tantangan yang mendapatkan prioritas untuk mencapai kesejahteraan bangsa pada abad milenium ini. Apabila melihat penjelasan PP 68/2009 tersebut, upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional harus bertumpu pada sumber daya pangan lokal yang mengandung keragaman antar daerah. Bustanul Arifin (2009).

Dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dari aspek ketersediaan, keterjangkauan yang meliputi daya beli dan harga itu sendiri, pada akhirnya, kondisi ketahanan pangan akan berpengaruh pada penciptaan iklim makroekonomi yang kondusif. Beberapa tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia meliputi laju pertumbuhan penduduk yang tinggi yang berimplikasi pada tingkat konsumsi, dan luas lahan pertanian yang semakin menurun akibat konversi lahan. Pemenuhan kebutuhan beberapa komoditas pangan strategis juga masih bergantung dari impor, permasalahan adopsi teknologi dalam rangka meningkatkan produktivitas juga masih terhambat karena rendahnya transfer teknologi dari lembaga penelitian format kepada petani.

## **KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Ketahanan Pangan**

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, sistem pangan nasional menempatkan kedaulatan dan kemandirian pangan sebagai spirit/fondasi dalam melaksanakan pembangunan pangan nasional. Kedaulatan negara dan bangsa dalam menentukan kebijakan dan sistem pangan dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak atas pangan bagi rakyat dengan mengutamakan potensi sumber daya lokal. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik kuantitas maupun kualitas, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk mencapai tujuan akhir, yaitu individu dan masyarakat yang hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pencapaian ketahanan pangan di Indonesia terkait dengan salah satu tujuan UUD 1945 dalam alinea keempat yaitu mencapai kesejahteraan umum. Hal tersebut berarti konsep ketahanan pangan mencakup ketersediaan pangan yang memadai, stabilitas, dan akses terhadap pangan-pangan utama. FAO (2012).

Ketahanan Pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap masyarakat yang tercermin dari ketersediaannya pangan yang cukup, baik jumlah mutunya, aman merata, terjangkau, dan berbasis pada keragaman sumber daya lokal. Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri dari sub sistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Sub sistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi

kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman, maupun keamanannya. Undang-Undang Republik Indonesia (Nomor 7 Tahun 2009).

Ketersediaan pangan dapat diwujudkan melalui proses kedaulatan pangan dan penganekaragaman pangan. Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Studi pustaka yang dilakukan oleh IFPRI (1999) diperkirakan terdapat 200 definisi dan 450 indikator tentang ketahanan pangan (Weingärtner, 2000). Ada beberapa hal penting dalam mengatasi permasalahan pangan di Indonesia. Purwaningsih (2008) yaitu:

1. Ketersediaan pangan. Negara berkewajiban untuk menjamin ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup (selain terjamin mutunya) bagi setiap warga negara, karena pada dasarnya setiap warga negara berhak atas pangan bagi keberlangsungan hidupnya. Penyediaan pangan dalam negeri harus diupayakan melalui produksi dalam negeri dari tahun ke tahun meningkat seiring dengan adanya pertumbuhan penduduk.
2. Kemandirian pangan. Kemandirian pangan suatu negara dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya merupakan indikator penting yang harus diperhatikan, karena negara yang berdaulat penuh adalah yang tidak tergantung (dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sebagainya) pada negara lain.
3. Keterjangkauan pangan. Keterjangkauan pangan atau aksesibilitas masyarakat (rumah tangga) terhadap bahan sangat ditentukan oleh daya beli, dan daya beli ini ditentukan oleh besarnya pendapatan dan harga komoditas pangan.
4. Konsumsi pangan. Konsumsi pangan berkaitan dengan gizi yang cukup dan seimbang. Tingkat dan pola konsumsi pangan dan gizi dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan budaya setempat.

### **Ekonomi Berkelanjutan**

Ekonomi berkelanjutan adalah sebuah sistem ekonomi dimana jumlah orang dan jumlah barang yang dipertahankan pada beberapa tingkat konstan. Tingkat ini adalah berkelanjutan secara ekologis dari waktu ke waktu dan memenuhi setidaknya dasar kebutuhan semua anggota populasi. (Millar, 1994).

Pembangunan berkelanjutan melibatkan merancang suatu sistem sosial dan ekonomi, yang menjamin bahwa tujuan ini berkelanjutan, yaitu bahwa sesungguhnya meningkatkan pendapatan, pendidikan yang standar meningkat, bahwa kesehatan bangsa membaik, bahwa kualitas umum kehidupan yang maju. (Pearce, Makandia, & Barbier, 1989).

Di Indonesia, ekonomi berkelanjutan didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang berfokus pada kesejahteraan bersama yang menguntungkan bagi produsen dan konsumen dengan tidak hanya menargetkan pada pertumbuhan ekonomi saja. Tujuan dari berkelanjutan merujuk pada pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berkelanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan, dan menjamin keadilan serta terlaksananya tata kelola yang menjaga kualitas hidup.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dituangkan secara deskriptif. Metode penelitian ini bermaksud memahami fenomena-fenomena yang dialami oleh obyek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, pemerintah telah mengembangkan strategi untuk meningkatkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja, dan pengembangan teknologi informasi.

Ekonomi berkelanjutan berarti mengembangkan sistem ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan masa depan tanpa mengorbankan generasi masa kini. Dalam konteks ini, peran ekonomi berkelanjutan sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional, terutama mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja, dan pengembangan teknologi informasi.

Ekonomi yang berkelanjutan menjadi salah satu pilar untuk mewujudkan visi Indonesia tahun 2045. Ekonomi berkelanjutan bertujuan untuk menopang perwujudan ekonomi Indonesia sebagai salah satu tolak ukur ekonomi baik di kawasan Asia Pasifik maupun dunia.

Dilatarbelakangi oleh RPJMN 2015-2019, Indonesia memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan dan energi, pengentasan kemiskinan, serta pengelolaan sumber daya alam. Kemudian, dikembangkan dalam RPJMN 2020-2024 yang menitikberatkan pada

program pertumbuhan ekonomi hijau yang diupayakan secara serius. Prioritas ini mencerminkan kebutuhan pembangunan yang mendesak dan komitmen internasional Indonesia untuk mencapai NDC dan SDGs.

Ekonomi hijau adalah ekonomi yang memiliki kemampuan untuk mereplika dirinya sendiri secara berkelanjutan. Fitur penting dari ekonomi hijau adalah pemisahan sistematis tingkat perubahan dalam output ekonomi dan aset lingkungan yang digunakan dalam proses itu. Oleh karena itu, Ekonomi Hijau konsisten terhadap kesejahteraan manusia dan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Dalam praktiknya, ekonomi hijau tidak terlepas dari pembangunan berkelanjutan. Kualitas lingkungan yang saat ini kian memburuk karena kegiatan industri, memunculkan perhatian lebih terhadap upaya menjaga keseimbangan antara kegiatan industri dengan kualitas lingkungan yang merupakan tujuan dari pembangunan berkelanjutan tersebut. Adapun pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga komponen, yakni ekonomi, ekologi, dan sosial.

Para ahli berpendapat bahwa faktor utama ketahanan pangan adalah ketersediaan makanan untuk semua kelompok sosial dan ekonomi populasi. Semakin dipahami bahwa mencapai ketahanan pangan lebih rumit dari sekadar memproduksi lebih banyak makanan.

Ketahanan pangan Indonesia tidak terlepas dari sifat produksi komoditi pangan itu sendiri yang musiman dan berfluktuasi karena dipengaruhi oleh iklim/cuaca. Apabila produsen rentan terhadap perubahan iklim, maka diperlukan kebijakan pangan yang tangguh agar tidak merugikan pihak produsen dan konsumen.

Permasalahan yang muncul lainnya yaitu di dalam proses distribusi. Stok pangan harus didistribusikan secara merata ke setiap daerah/pulau. Tidak jarang juga sarana dan prasarana pada saat melakukan distribusi masih terbatas dan terkadang biaya pengiriman yang lebih mahal daripada distribusi dari luar negeri.

Upaya untuk mempromosikan keamanan pangan harus membedakan antara langkah jangka pendek dan menengah serta antara negara-negara dengan potensi pertanian dan tanpa potensi tersebut. meskipun harga pangan internasional yang tinggi memberikan insentif yang sesuai untuk pengembangan pertanian, akan keliru jika mengharapkan bahwa hal itu secara otomatis akan menghasilkan peningkatan produksi pertanian. Sebagian besar pendapatan orang miskin dihabiskan untuk makanan, karena makanan sangat penting bagi orang berpendapatan rendah untuk mempertahankan kehidupan sehari-hari ketika negara memiliki

keamanan pangan yang rendah. Keamanan pangan membawa manfaat signifikan bagi kesehatan manusia dan menjadi dasar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan PDB pertanian hingga empat kali lebih berhasil dalam mengurangi kemiskinan dibandingkan pertumbuhan dari sektor lainnya. Keamanan pangan tidak hanya tentang makanan dan memberi makan orang, tetapi juga berkaitan dengan semua aspek ekonomi dan masyarakat karena ketidakamanan pangan berhubungan dengan kemiskinan.

Berbagai gejolak sosial dan politik dapat terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional.

Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat, baik dari produksi dalam negeri maupun dengan tambahan impor. Pemenuhan kebutuhan pangan dan menjaga ketahanan pangan menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya sangat besar dengan cakupan geografis yang luas dan tersebar. Indonesia memerlukan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan di atas, maka pertimbangan yang dapat diambil, yaitu kebijaksanaan pangan nasional harus dapat mengakomodasikan dan menyeimbangkan antara aspek *supply* dan *demand*. Pengelolaan dari kedua aspek tersebut harus mampu dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang tangguh menghadapi segala gejolak. Pengelolaannya harus dilakukan dengan optimal mengingat kedua aspek tersebut dapat berjalan dengan tidak sejalan atau bertolak belakang.

## **SIMPULAN**

Peran ekonomi berkelanjutan dalam mewujudkan ketahanan pangan di IKN pada 2045 mendatang dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi hijau yang berdampak positif terhadap ketahanan pangan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi hijau, perubahan iklim yang dapat berdampak negatif terhadap hasil pertanian dapat dicegah sehingga ketahanan pangan menjadi lebih stabil. Ekonomi hijau menempatkan fokus pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan melibatkan penggunaan sumber daya alam secara bertanggung jawab, pengurangan polusi, dan pemanfaatan energi terbarukan. Ketahanan pangan di Indonesia tidak terlepas dari sifat produksi komoditi pangan itu sendiri yang musiman dan berfluktuasi karena dipengaruhi oleh iklim/cuaca. Apabila produsen

rentan terhadap perubahan iklim, maka diperlukan kebijakan pangan yang tangguh agar tidak merugikan pihak produsen dan konsumen.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Makmur K. et al. (2022). *Ekonomi Hijau dalam Visi Indonesia 2045*. Laboratorium Indonesia 2045.
- Ryan N. et al. (2024). *Green Economy: Teori, Konsep, Gagasan Penerapan Perekonomian Hijau Berbagai Bidang di Masa Depan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian/Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan. (2019). *Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan & Gizi*.
- Reni Chaireni, D. A. (2020). *Ketahanan Pangan Berkelanjutan*.
- Suryana, A. (2014). *Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025: Tantangan dan Penanganannya*.
- Virginia V. Rumawas, H. N. (2021). *Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan)*.
- Purwaningsih. et al. (2010). “*Analisis Permintaan Pangan Rumah Tangga Menurut Tingkat Ketahanan Pangan di Provinsi Sulawesi Utara (Analisis Data Susenas 2008)*”. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan. Jurnal Eko- Regional FE UNSOED*, Volume 5, Nomor 1, Maret 2010.
- Pearce, D. W., Makandia, M. B., & Barbier, E. B. (1989). *Blueprint for a sustainable economy*. Edward Elgar Publishing.
- Millar, R. (1994). *Sustainable development: Infrastructural and economic issues*. *Journal of Environmental Planning and Management*, 37(1), 1-19.
- (Weingärtner, 2000).